

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya Alhamdulillah Rencana Kerja (RENJA) yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu mandat dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang tertuang dalam **Rencana Strategis (Renstra)** Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen dalam peletakan kebijakan operasional dalam menjawab tantangan pembangunan kependudukan.

Pelaksanaan rencana kerja dalam pembangunan kependudukan dititik beratkan pada bagaimana melayani masyarakat dengan pelayanan yang berkualitas, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana kependudukan dan pencatatan sipil dan meningkatkan ilmu dan pengetahuan aparatur. Segala saran, pendapat maupun kritik yang bersifat membangun, sangat kami harapkan untuk meningkatkan kinerja tugas kami ke depan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rencana kerja ini, semoga rencana ini dapat bermanfaat dan menjadi suatu acuan meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Masamba, Juli 2017

KEPALA DINAS,

MAS'UD MASSE, SE.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19600613 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Tahun 2016-2021	5
B. Analisa Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..	6
C. Issu Issu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	8
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	9
E. Penelahan dan Usulan Program Masyarakat	10
BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENJA TAHUN 2018 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU UTARA	
A. Tujuan Dan Sasaran Renja	11
B. Program dan Kegiatan	12
BAB IV PENUTUP.....	14

BAB I P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2018 disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang kemudian ditetapkan dengan peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta tata kerja Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.

Seiring dengan perkembangan Teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani lebih cepat, sehingga menuntut pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien dan akuntabel. Untuk menyikapi semua itu, pemerintah harus menyusun sebuah kebijakan yang strategis untuk menjadi arah dan ukuran kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Renja dimaksud berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Luwu Utara.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu Terwujudnya Pelayanan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Luwu Utara.
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah
12. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah
14. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
15. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara
16. Peraturan Daerah Luwu Utara No. tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031
18. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2005-2025
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2016-2021.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara adalah untuk memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dengan berpedoman pada Renstra Dukcapil Kabupaten Luwu Utara serta memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018.

b. Tujuan

- Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama satu tahun.
- Untuk memberikan landasan kebijakan dan strategi satu tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (RENJA) Dukcapil Kabupaten Luwu Utara disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR**DAFTAR ISI****BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat ; Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DUKCAPIL.

Memuat; Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan capaian Renstra Tahun 2016- 2021, Analisis Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isu – Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dukcapil, Review terhadap Rancangan Awal (RKPD), Penelaahan dan usulan Program Masyarakat.

BAB. III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

Memuat : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (Mendagri), Tujuan dan sasaran Renja Dukcapil, Program dan Kegiatan

BAB. IV PENUTUP**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**Tabel.2.1**

**REKAPITULASI EVALUASI RENJA SKPD 2016 KABUPATEN LUWU UTARA
DENGAN**

SKPD	CAPAIAN KINERJA OUT COME DAN OUT PUT	KRITERI CAPAIAN KINERJA	JUMLAH DAN PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN	KRITERIA KETEPATAN PERENCANAAN
------	--	-------------------------------	--	--------------------------------------

	2016 (%)	2016-2021(%)	2016	2016	JUMLAH		RENDAH (%)	SESUAI TARGET (%)	MELE-BIHI TARGET (%)	TDK TERLAK-SANA (%)	% YANG MEMENUHI TARGET
					Program	Kegiatan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Dukcapil	86,11	59,02	Sangat tinggi	Sangat tinggi	6	19	1	15	4		
	92,67	50,53					0,05	78,95	21,05		

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dukcapil Kabupaten Luwu Utara jumlah kegiatan tahun 2016 sebanyak 19 kegiatan dan 6 program adapun tingkat capaian kinerja renja tahun 2016 yang dievaluasi dalam persen (%) adalah untuk kriteria kinerja program (*Out Come*) sebesar 86,11% dengan kategori ketepatan perencanaan “Sangat Tinggi” dan kinerja kegiatan (*Out Put*) sebesar 92,67 % dengan kategori ketepatan perencanaan “Sangat Tinggi”.

B. Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran selama tahun 2016 yaitu:

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara berdasarkan indikator yang ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.

Capaian kinerja pelayanan ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran dalam tahun 2016 yaitu:

1. Sasaran Terlaksananya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sasaran yaitu :

- ✓ Indikator Pertama, *Persentase jumlah penduduk wajib KTP* pada tahun 2016 jumlah pelayanan dari target 92% terealisasi mencapai 118% sehingga pencapaiannya 129%. Peningkatan ini disebabkan pelayanan langsung di kecamatan dan melakukan pencetakan langsung di beberapa kecamatan.

- ✓ Indikator Kedua, *Persentase jumlah penduduk ber KK* ditahun 2017 dengan target pelayanan 92% orang dengan realisasi penerbitan pelayanan 140%, sehingga pencapaiannya 153%, peningkatan ini meningkat disebabkan banyaknya penduduk pecah kk disebabkan membentuk keluarga baru dan sebagainya.
 - ✓ Indikator Ketiga, *Persentase penduduk memiliki akta kelahiran* dengan target pelayanan ditahun 2017 sebanyak 92% dengan realisasi sebesar 109% sehingga pencapaiannya 119%. Peningkatan ini disebabkan adanya pelayanan langsung dan bantuan kerjasama instansi terkait dan stekholder.
 - ✓ Indikator Keempat, *Presentase penduduk memiliki akta perkawinan & akta lainnya* mencapai 36%. Kurangnya pencapaian ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat kepengurusan akta perkawinan non muslim, perceraian dan kematian.
-
2. Sasaran meningkatnya kemampuan aparat dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK), bahwa target dari 70% dari jumlah pegawai yang memiliki kemampuan mengelola sistem administrasi kependudukan dimana pencapaian 32 orang atau 70% dalam pelayanan masyarakat dari target 46 orang atau 75% tahun 2017 sehingga mencapai 100%.
 3. Sasaran tersedianya database Kependudukan yang valid dan berkelanjutan dititikberatkan pada kegiatan pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan dimana pencapaian 88% dari target 88% tahun 2017 mencapai 100%. Sasaran tersebut dititikberatkan pada komunitas yaitu pelaporan data kependudukan yang valid setiap bulannya yang berkelanjutan ditargetkan dari 14 laporan dengan target 12 laporan realisasi yang dicapai sebanyak 12 laporan atau sebesar 88%, sehingga capaian kinerja 100%.
 4. Sasaran meningkatnya kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimana realisasi pencapaian 5 aparat atau 40% tahun 2017 sehingga capaian kinerja 100%. Sasaran tersebut dititikberatkan pada komunitas bimtek aparat yaitu aparat

dukcapil ditargetkan 5 aparat dengan realisasi yang dicapai sebanyak 5 atau sebesar 40%, sehingga capaian kinerja 100%. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

-
5. Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana administrasi pelayanan dititikberatkan pada program sarana dan prasarana dimana prosentase peningkatan sarana dan prasarana administrasi pelayanan dengan target 96% dan realisasi sebesar 96% sehingga capaian kinerja 100%. Peningkatan sarana prasarana ini terealisasi sehingga pelayanan menjadi lebih baik dan berjalan dengan lancar.
 6. Sasaran meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi kerjasama dengan instansi terkait yaitu dititikberatkan pada kegiatan rapat koordinasi dimana Prosentase efisien dan efektifitas pelayanan dengan target 99% dan realisasi sebesar 99,99% pencapaian ini dikarenakan anggaran rakor sebesar Rp. 358.394.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 358.331.350,- (99,99%) dan terdapat efisien anggaran sebesar Rp. 62.650,- sehingga peningkatan koordinasi, integrasi dan singkronisasi kerjasama instansi terkait dapat berjalan dengan baik dan lancar.
 7. Sasaran Terwujudnya pengelolaan kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi dimana prosentase pengelolaan kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi dengan target 96% realisasi sebesar 96% sehingga capaian kinerja 100%. informasi sistem SIAK yang terintegrasi dan terkendali dan on line dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pusat dan informasi melalui PPID Dukcapil.

C. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Melihat permasalahan dan isu yang berkembang terhadap pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, sehingga perlu menetapkan dan menentukan isu-isu strategis sbb :

1. Tingkat Kinerja Pelayanan & Hal kritis yang terkait dengan Pelayanan;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan data tahun 2016 didukung oleh 46 orang PNS (Lk 17 org dan pr 29 org) dengan Kualifikasi sebagai berikut :

a) Klasifikasi Pendidikan

Sarjana (S.2)	:	1 Orang
Sarjana (S.1)	:	22 Orang
Sarjana Muda/D3	:	2 Orang
SMA	:	20 Orang
<u>SMP</u>	:	<u>1 Orang</u>
Jumlah	:	46 Orang

b) Klasifikasi Eselon

Eselon II.b	:	1 Orang
Eselon III.a	:	1 Orang
Eselon III.b	:	4 Orang
Eselon IV.a	:	15 Orang
Staf	:	<u>16 Orang</u>
Jumlah	:	46 Orang

c) Komposisi Jenjang Kepangkatan

Pembina Utama Muda/Golongan IV.c	:	1 Orang
Pembina TK.I/ Golongan IV.b	:	4 Orang
Pembina/Golongan IV.a	:	4 Orang
Penata TK.I/Golongan III.d	:	12 Orang
Penata/Golongan III.c	:	4 Orang
Penata Muda TK.I/Golongan III.b	:	6 Orang
Penata Muda/Golongan III.a	:	9 Orang
Pengatur TK.I/Golongan II.b	:	3 Orang
Pengatur Muda/Golongan II.a	:	2 Orang
<u>Juru / Golongan I/c</u>	:	<u>1 Orang</u>
Jumlah	:	46 Orang

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara adalah suatu kondisi harus mendapat perhatian atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan jangka menengah daerah di bidang Pelayanan administrasi kependudukan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh data sebagai berikut:

- Sarana dan prasarana peralatan tidak memadai
- Tingkat kesadaran masyarakat yang belum memahami prosedur pengurusan & penerbitan KTP dan Akte kelahiran, kematian, perkawinan, akta perceraian dan akta pengukuhan/pengesahan anak masih rendah.
- Akurasi data kependudukan dari tingkat dusun, desa kecamatan dan kabupaten belum optimal.
- Kurangnya personil/staf PNS yang ditempatkan sebagai tenaga pelayanan/petugas pengelola SIAK
- Standar ruang pelayanan yang kurang nyaman
- Kurang pemahaman aparat ditingkat desa dan kecamatan tentang syarat dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Adapun pemecahan masalah yaitu :

- Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan
- Melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta kemudahan-kemudahan dalam pengurusan penerbitan KTP dan Akte kelahiran, kematian, perkawinan, akta perceraian dan akta pengukuhan/pengesahan anak masih rendah.
- Mengoptimalkan akurasi data kependudukan melalui dari tingkat dusun, desa kecamatan dan kabupaten.
- Mengusulkan kepd instansi terkait perihal penempatan PNS didukcapil Kab.Lutra.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan pada prinsipnya tidak jauh berbeda, sebagaimana terlihat pada lampiran dalam tabel 2.4 review terhadap rancangan awal RKPD.

E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

1. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun kebijakan, tetap berpedoman dari hasil Musrembang dan aspirasi – aspirasi dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan.
2. Usulan masyarakat dalam pelayanan KTP, KK dan Akte kelahiran dimaksud karena tingkat pemahaman masyarakat terhadap identitas diri masih rendah.
3. Dari hasil penelaahan usulan program masyarakat maka dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil memprogramkan pelayanan langsung sampai ketingkat desa dan kelurahan, pelayanan KTP dan KK, Akte Kelahiran, Perceraian dan Akta Lainnya.

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018
KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM RENJA TAHUN 2018 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pada Bab III membahas tentang rancangan program dan kegiatan prioritas dalam RENJA Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, yang berisi Anggaran belanja tahun 2018. Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2018 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam mencapai target kinerja program dan kegiatan.

A. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

1. Tujuan :

- a. Melaksanakan tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Meningkatkan kemampuan aparat dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
- c. Melaksanakan database Kependudukan yang berkelanjutan
- d. Meningkatkan kemampuan aparat yang profesional
- e. Meningkatnya pelayanan publik
- f. Meningkatkan koordinasi, integrasi sinkronisasi kerjasama dengan instansi terkait
- g. Mewujudkan pengelolaan kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi.

2. Sasaran :

- a. Terlaksananya tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Meningkatnya kemampuan aparat dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
- c. Tersedianya database kependudukan yang valid dan berkelanjutan
- d. Meningkatkan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

- e. Meningkatnya sarana dan prasarana administrasi pelayanan
- f. Meningkatnya koordinasi, integrasi sinkronisasi kerjasama dengan instansi terkait
- g. Terwujudnya pengelolaan kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi

Tabel 3.2

Dapat digambarkan dalam lampiran tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran :

B. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun 2018 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melandasi tugas pokok dan fungsinya serta diselaraskan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Luwu Utara.

Program dan Kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan
- e. Program Pelayanan Kedinasan
- f. Program Penataan Administrasi Kependudukan

2. Kegiatan :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- 1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2). Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- 3). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 5). Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.
- 6). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.
- 7). Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, ketatausahaan dan Asset.

- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :**
 - 1). Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 2). Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 3). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 4). Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - 5). Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
- c. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :**

Bimbingan teknis implementasi, peraturan perundang –undangan
- d. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan :**

Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- e. **Program Pelayanan Kedinasan :**

Kunjungan kerja bersama Bupati/Wakil
Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah.
- f. **Program Penataan Administrasi Kependudukan :**
 - 1). Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
 - 2). Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan.
 - 3). Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
 - 4). Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
 - 5). Pengolahan Administrasi Pencatatan Sipil
 - 6). Pemanfaatan & Penataan Administrasi
Kependudukan&Pencatatan Sipil

Program dan kegiatan tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sebagaimana terlampir dalam tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018.

BAB IV PENUTUP

TINJAUAN UMUM

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara ini selain menjadi bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dukcapil Kab.Luwu Utara. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf dukcapil kab. Luwu utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

SARAN TINDAK LANJUT

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terumata yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dan melalui kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan atas saran serta bantuan yang diberikan.

Masamba, 2017

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN SIPIL
KAB. LUWU UTARA

MAS'UD MASSE, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19600613 199203 1 004

Tabel.2.2
Evaluasi Kinerja Tahun 2016
(Realisasi Anggaran)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2016		Realisasi	
		Target	Anggaran	%	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1. Penyediaan surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	600 lbr	5.000.000,-	99,96%	4.998.000,-
2. Penyediaan js kebersihan kantor	Jumlah cleaning servis	2 org	28.500.000,-	100%	28.500.000,-
3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik	5 jenis	5.000.000,-	99,95%	4.997.500,-
4. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan srt kabar, dan majalah	10 jenis	7.000.000,-	99,07%	6.935.000,-
5. Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yg diikuti	46 rapat	358.394.000,-	100%	358.331.350,-
7. Penatausahaan keuangan,adm. kepegawaian, ketatausahaan & aset	Jumlah laporan keuangan, kepegawaian, penatausahaan & aset	4 dok/lap	269.275.000,-	99,06%	266.755.000,-
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
1. Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yg diadakan	12 unit	390.900.000,-	99,35%	388.359.500,-
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yg dipelihara	1 unit	10.000.000,-	99,90%	9.990.000,-
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara	2 unit	20.000.000,-	75,00%	19.689.150,-
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung akntor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg dipelihara	5 jenis	43.556.000,-	100%	43.556.000,-
5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mobiler yg mendapatkan pemeliharaan	3 jenis	5.000.000,-	100%	5.000.000,-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yg mengikuti bimtek, sosialisasi	5 PNS	90.556.000,-	94,71%	85.768.600,-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan Lakip,RKA,DPA & LPPD	4 dok	10.000.000,-	94,00%	9.400.000,-
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan					
1. Kunjungan kerja bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/pejabat pemerintah tingkat atas/unit kerja terkait dan pihak lainnya	Jumlah aparat mengikuti kunker	21 org	7.760.000,-	100%	7.760.000,-
Program Penataan Administrasi Kependudukan					
1. Pengolahan dlm penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah laporan kependudukan	12 laporan	163.100.000,-	99,96%	163.029.750,-
2. Peningkatan pelayan publik dlm bidang kependudukan	Jumlah penduduk yg dilyani KTP, KK, surat mutasi	44.100 org	641.742.000,-	99,99%	641.691.016,-
3. Pengolahan Administrasi catatan sipil	Jumlah penduduk yg terlayani akte kelahiran, akte pernikahan & akte perceraian dan akte kematian	10.000 org	695.362.000,-	99,98%	695.200.400,-
4. Pengolahan arsip kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah dokumen yg diarsipkan	46 dok	115.500.000,-	99,73%	115.189.000,-
5. Penyediaan informasi kependudukan	Prosentase informasi yg dpt diakses masy.	1 jenis/50buku	61.600.000,-	99,67%	61.396.050,-
Program perencanaan pembangunan daerah					
1. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Prosentase dokumen perencanaan pembangunan daerah	8 dok, RPJMN, RPJMD, RPJPP, RPJMD Prop, Renstra, Renja, KUA PPAS, RAPBD/ 10 paket	44.800.000,-	99,85%	44.733.450,-
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	-	-	-	-	-

JUMLAH	6.318.000.000,-	98,09%	6.197.612.725,-
--------	-----------------	--------	-----------------